



HAKORDIA
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2025
Satukan Aksi Basmi Korupsi

**PAKSI API
JABAR**



Pelembagaan **Integritas** di Lorong-lorong Pelayanan Publik


Oleh
Kukuh Fadli Prasetyo
Penyuluh Antikorupsi Madya

Dipaparkan pada kegiatan Kelas Integritas dalam rangka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor
27 November 2025

Ruang lingkup **Pelayanan Publik** meliputi pelayanan **barang publik** dan **jasa publik** serta pelayanan **administratif** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Ps. 5 (1) UU 25/2009 -

... meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- Ps. 5 (2) UU 25/2009





Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengakuan dan pemenuhan hak warga negara atas pelayanan publik, ada beberapa hak konstitusional yang berkaitan dengan pelayanan publik. Misalnya hak atas pendidikan dan hak atas layanan kesehatan.

Di lain pihak, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kewajiban Negara untuk menyelenggarakan pelayanan umum.



Kualitas Pelayanan Publik Tidak Bernilai Statis

- meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
- meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah; dan
- meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

- Sub 1.6 Lampiran 1 Permenpan RB 90/2021 -

Integritas

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.
[Ps. 34 huruf h UU 25/2009]

Jembatan kontekstual-normatif

Pelayanan publik memiliki keterkaitan dengan integritas para aktornya, terutama penyelenggaranya. Artinya, integritas tidak dapat dipisahkan dari upaya negara memastikan pemenuhan pelayanan publik kepada warganya.

Pelayanan Publik

INTEGRITAS

#JumatBersepedaKK

Jujur Mandiri Tanggung jawab Berani Sederhana Peduli Disiplin Adil Kerja Keras



PERILAKU NIRINTEGRITAS

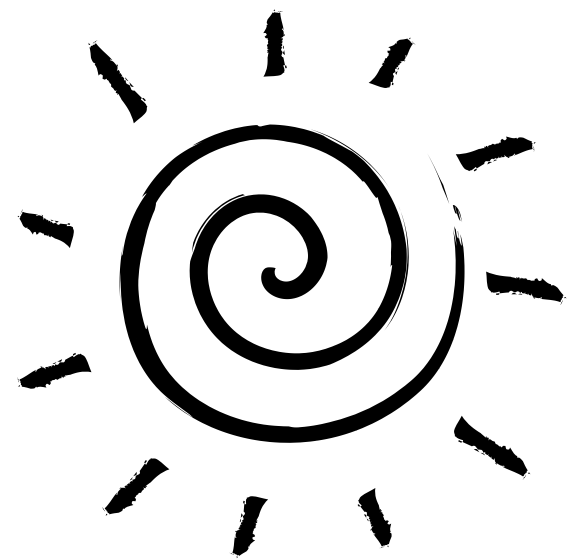
Tidak mengaktualisasikan nilai-nilai antikorupsi: jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

MALADMINISTRASI

perilaku atau perbuatan **melawan hukum**, **melampaui wewenang**, **menggunakan wewenang untuk tujuan lain** dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk **kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum** dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

- Ps. 1 angka 3 UU 37/2008 -





Dampaknya bisa
jadi serius kan?!



Setelah hari itu, yang bersangkutan
tidak akan pernah lagi meminta
hak konstitusionalnya atas
layanan kesehatan

VIVA DIGITAL VIVA LIFESTYLE VIVA NETWORK

Viral Pasien Meninggal saat Urus E-KTP dan BPJS

Rabu, 16 Maret 2022 - 09:26 WIB

Oleh : Syahdan Nurdin



Viral Pasien Meninggal saat Urus E-KTP dan BPJS

Sumber : Instagram@andrel_i_48



Share :



VIVA – Video seorang **pasien meninggal**
dunia saat mengurus E-KTP dan BPJS
viral di media sosial.



SERVICE DELAYED, SERVICE DENIED

Dilihat dari karakteristiknya, beberapa pelayanan publik menasar pemenuhan hak-hak dasar warga negara, misalnya pendidikan dan kesehatan.

Secara kontekstual, hal tersebut diafirmasi melalui atribut tertentu sebagai penanda bagi pentingnya penunaian pekerjaan tersebut. Misalnya, penyebutan "urusan wajib pemerintah daerah" di UU 23/2014.

Pada tataran yang ekstrem, penundaan pemenuhan hak warga negara (terutama yang bersifat dasar) untuk mendapatkan pelayanan dapat berujung pada tidak terpenuhinya hak warga negara tersebut



**TERNYATA TIDAK HANYA PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK YANG HARUS
MENJAGA INTEGRITAS**

NEXT

Pura-pura Tidur, Modus Buat Mereka yang Tak Mau Berbagi Kursi di Commuter Line

- detikNews

Rabu, 05 Nov 2014 08:59 WIB



Jakarta - Pura-pura tidur mungkin jadi modus paling sering dilakukan oleh mereka yang tak mau berbagi kursi di commuter line kepada ibu hamil, lansia, atau penyandang cacat. Walau penumpang lain sudah berteriak-teriak agar memberikan kursi, tetap saja penumpang modus pura-pura tidur itu cuek.

Seperti pagi ini saja, Rabu (5/11/2014) di kereta Bojong balik atau kereta dari Bojong Gede menuju Jakarta Kota yang berangkat pukul 06.06 WIB, ada



Kaktus Penuh Coretan di Kebun Raya Bogor Tak Bisa Dipulihkan

Tayang: Sabtu, 3 Oktober 2015 14:22 WIB [Baca tanpa iklan](#)

Penulis: **Vivi Febrianti** | Editor: **Suut Amdani**



Tribunnewsbogor.com/Vivi Febrianti

Kaktus yang dicorat-coret ini berada di Taman Meksiko, Kebun Raya Bogor, Jalan Ir H Djuanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/10/2015).

A⁻ A⁺

10 Coretan Nyeleneh Siswa di Meja Sekolah, Absurd tapi Bikin Kangen

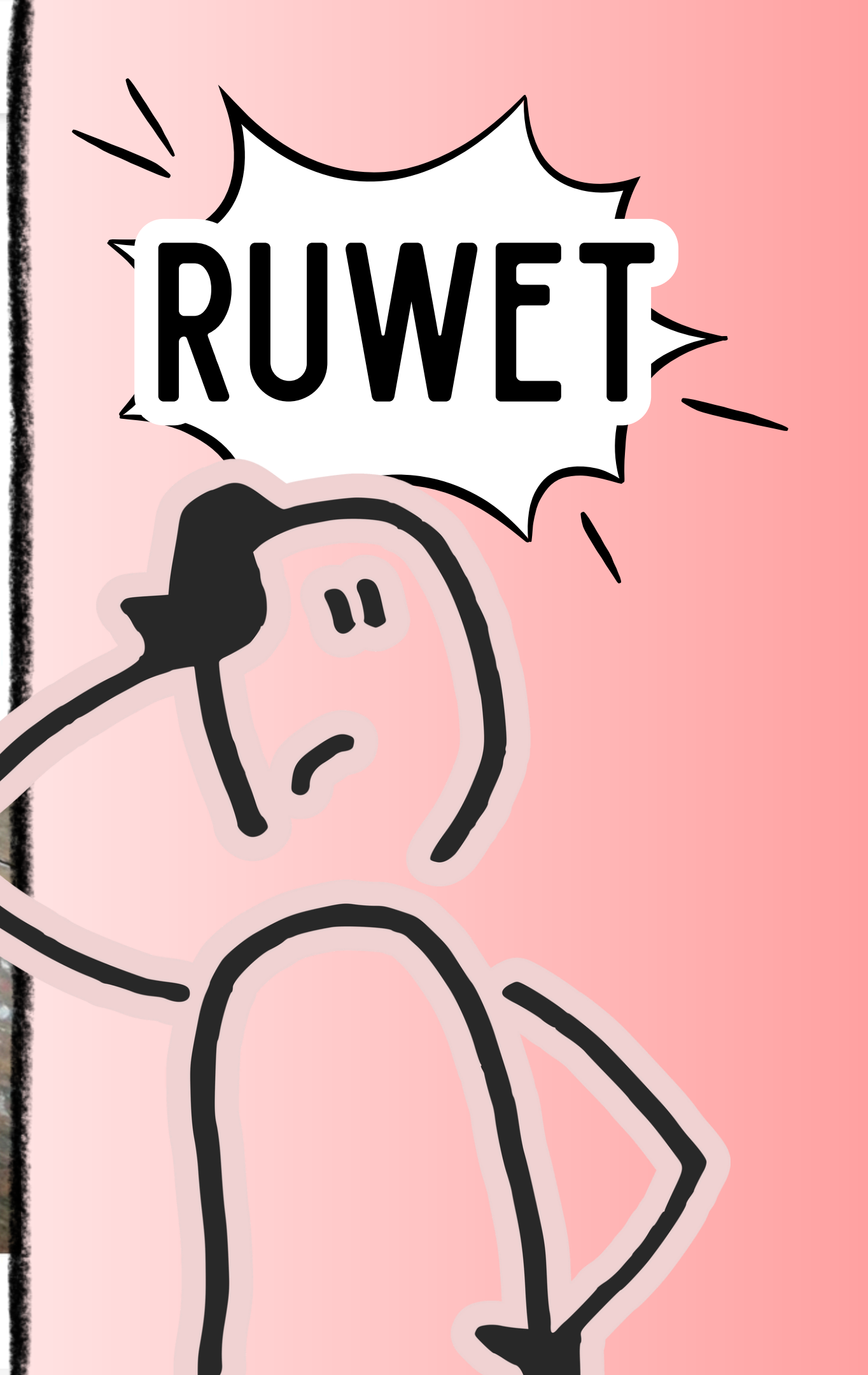
Momen semasa sekolah yang paling diingat yakni coretan-coretan absurd yang dibuat di meja sekolah. Penasaran bagaimana? Cek di sini.

oleh **Yulia Lisnawati** Diterbitkan 02 Agustus 2018, 08:00 WIB

0 Komentar Share



(Foto: brilio.net)





Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur hubungan antara 2 aktor masyarakat dan penyelenggara




Bukan hanya aparat pemerintah, masyarakat sebagai pengguna layanan juga harus menegakkan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menegur atau memanfaatkan layanan pengaduan pelayanan publik terhadap perilaku tidak berintegritas yang dapat menimbulkan kerugian publik/individual



TERIMA KASIH

 cak.kukuh

 pak.kukuh@ipdn.ac.id

 kf-prasetyo

